BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dalam: pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah; pengkoordinasian pelaksanaaan kebijakan daerah; dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Tugas Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah sangat menentukan dalam pencapaian target-target pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menetapkan 13 (tiga belas) target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, 10 Program Unggulan Daerah, IKU Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Daerah. Terkait dengan berbagai indikator dan target pembangunan tersebut, Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat daerah koordinator pencapaian target-target pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dihadapkan dengan bencana non alam "pandemi *Covid-19*" yang berdampak pada ketidakstabilan baik secara global maupun nasional. Pandemi *Covid-19* selain menimbulkan ancaman kesehatan juga berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan permasalahan sosial. Sebagai kebijakan penanganan atas dampak pandemi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2020 menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Desease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah.

Guna pembiayaan penanganan dampak *Covid-19*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan dua kali refocusing APBD Tahun Anggaran 2020. Sinergi dengan perubahan prioritas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam penanganan pandemi *Covid-19*, Setda menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 yang mendasarkan pada penyesuaian target kinerja serta pendanaannya. Dokumen Renja Perubahan Setda Tahun 2020 ini

menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan di sembilan biro lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga program dan kegiatan berjalan secara sistematis, efektif, dan efisien.

Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Sebagai gambaran capaian kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun 2019 dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanakan Program dan Kegiatan tahun berikutnya.
3. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan, serta sinergi antar Biro dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah
2.2. Indikator Kerja Program/Kegiatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, berikut hasil evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah sampai dengan triwulan kedua tahun 2020 yang dituangkan dalam Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Indiktor Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

No	Tujuan dan Sasaran	Indiktor Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)
						Triwulan I	Triwulan II		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	93.02	81	NA	NA	NA	NA
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	86.36	81	NA	NA	NA	NA
		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	75.63	76	NA	NA	NA	NA
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	100	85	NA	NA	NA	NA
		Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	100	85	0	30	30	35.3
		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	71	75	0	30	30	40.0
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	85.71	85	17	34	34	40.0
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealiasi	%	83.05	85	20	40	40	47.1
		Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	100	91	90	90	90	98.9
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	100	87	0	40	40	46.0

No	Tujuan dan Sasaran	Indiktor Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)
						Triwulan I	Triwulan II		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	81	82	21,67	43,26	43,26	52.8
		Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	96.6	82	NA	NA	NA	NA
		Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	95.63	81	96,77	97,01	97,01	119.8
		Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	100	91	90	90	90	98.9
		peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	100	91	90	90	90	98.9
		Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	100	91	90	90	90	98.9
		Nilai Kematangan Organisasi Daerah	%	24.78	22	7	11	11	50.0
		presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	92.63	64.32	20	40	40	62.2
		Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	75	78	15	30	30	38.5
		Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	40	40	5	15	15	37.5
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	100	84	18	40	40	47.6

No	Tujuan dan Sasaran	Indiktor Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)
						Triwulan I	Triwulan II		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	88.46	85	17	34	34	40.0
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	87.5	89	17	34	34	38.2
		Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	96.93	63	15	20	20	31.7
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85.71	85	NA	NA	NA	NA
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	75	84	NA	NA	NA	NA
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan	%	100	100	NA	NA	NA	NA
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	85.41	85	NA	NA	NA	NA
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	90	100	NA	NA	NA	NA
		Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	100	0	30	30	30.0

No	Tujuan dan Sasaran	Indiktor Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)
						Triwulan I	Triwulan II		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah	%	100	100	33	66	66	66.0
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	75.63	76	NA	NA	NA	NA
Permasalahan: Indikator Tujuan dan Sasaran merupakan impact atas capaian kinerja program dan kegiatan sehingga tidak dimungkinkan evaluasi secara triwulanan									
Tindak Lanjut: Evaluasi indikator tujuan dan sasaran akan dilaporkan pada LKjIP									

Evaluasi kinerja tujuan dan sasaran merupakan penilaian atas impact capaian kinerja program dan kegiatan secara menyeluruh, oleh karena itu capaian sampai dengan TW II merupakan hasil perhitungan sementara dan belum mencerminkan hasil akhir. Progress capaian kinerja tujuan dan sasaran sampai dengan TW II juga belum mencerminkan kinerja seluruh biro yang berkontribusi pada pencapaian hasil akhir.

Capaian kinerja tujuan dan sasaran Setda Provinsi Jawa Tengah akan didapat atau dievaluasi pada triwulan keempat (akhir tahun). Dan pengendalian pencapaian target akan dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh komponen pelaksana biro-biro di lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah. Capaian kinerja akhir tahun akan dilaporkan pada LKjIP Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.

2.2 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, berikut hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan Setda Provinsi Jawa Tengah sampai dengan triwulan kedua tahun 2020 yang dituangkan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Evaluasi Indikator Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	NON URUSAN											
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah											
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	%	100	100	100	100	100				
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	%	100	100	100	100	100				
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	%	100	100	100	100	100				
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100				
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	%	100	100	100	100	100				
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	%	100	100	100	100	100				
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100				
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100	100				
		Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100				
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	%	100	100	100	100	100				
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah								2.100.000.000	2.100.000.000	483.499.950	23,02
		Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	12	3	3	6	50%	2.100.000.000	2.100.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								210.000.000	210.000.000	-	0,00
		Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	12	3	3	6	50%	210.000.000	210.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								45.000.000	40.000.000	7.240.000	16,09
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum	Bulan	12	3	3	6	50%	45.000.000	40.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								35.000.000	35.000.000	9.255.700	26,44
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	35.000.000	35.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								30.000.000	30.000.000	6.895.500	22,99
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian	Bulan	12	3	3	6	50%	30.000.000	30.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								125.000.000	125.000.000	-	0,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	3	3	6	50%	125.000.000	125.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								45.000.000	45.000.000	9.487.129	21,08
		Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Biro APBJ	Bulan	12	3	3	6	50%	45.000.000	45.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								350.000.000	350.000.000	35.130.500	10,04
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	350.000.000	350.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								123.200.000	123.200.000	52.331.200	42,48
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	12	3	3	6	50%	123.200.000	123.200.000		
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								95.000.000	95.000.000	24.005.000	25,27
		Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Biro Organisasi	Bulan	12	3	3	6	50%	95.000.000	95.000.000		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah								8.000.000.000	8.000.000.000	2.771.089.499	34,64
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	8.000.000.000	8.000.000.000		
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah								1.200.000.000	1.200.000.000	245.850.608	20,49
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	1.200.000.000	1.200.000.000		

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah								12.500.000.000	12.500.000.000	5.880.243.755	47,04
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Bulan	12	3	3	6	50%	12.500.000.000	12.500.000.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								910.000.000	750.000.000	158.735.600	17,44
		Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	12	3	3	6	50%	910.000.000	750.000.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								410.000.000	328.000.000	89.645.200	21,86
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	Bulan	12	3	3	6	50%	410.000.000	328.000.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								550.000.000	440.000.000	83.401.713	15,16
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	550.000.000	440.000.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								390.000.000	312.000.000	52.031.196	13,34
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	Bulan	12	3	3	6	50%	390.000.000	312.000.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								400.000.000	321.800.000	52.445.194	13,11
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	3	3	6	50%	400.000.000	321.800.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								635.000.000	508.000.000	108.357.900	17,06
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro APBJ	Bulan	12	3	3	6	50%	635.000.000	508.000.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								400.000.000	320.000.000	42.838.700	10,71
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi	Bulan	12	3	3	6	50%	400.000.000	320.000.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								620.900.000	496.720.000	149.980.956	24,16
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	12	3	3	6	50%	620.900.000	496.720.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								4.476.643.000	3.731.314.000	560.470.380	12,52
		Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	4.476.643.000	3.731.314.000		
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								55.000.000	55.000.000	16.500.000	30,00
		Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	12	3	3	6	50%	55.000.000	55.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								40.000.000	40.000.000	11.590.000	28,98
		Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	Bulan	12	3	3	6	50%	40.000.000	40.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								40.000.000	40.000.000	20.495.000	51,24
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	40.000.000	40.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								20.000.000	20.000.000	7.600.000	38,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian	Bulan	12	3	3	6	50%	20.000.000	20.000.000		

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								75.000.000	75.000.000	-	0,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	3	3	6	50%	75.000.000	75.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								25.000.000	25.000.000	6.150.000	24,60
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Biro Organisasi	Bulan	12	3	3	6	50%	25.000.000	25.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								9.000.000.000	9.000.000.000	2.691.862.000	29,91
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	9.000.000.000	9.000.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								15.000.000	15.000.000	5.369.800	35,80
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	12	3	3	6	50%	15.000.000	15.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								35.000.000	35.000.000	16.700.000	47,71
		Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Bulan	12	3	3	6	50%	35.000.000	35.000.000		
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah								200.000.000	200.000.000	53.920.000	26,96
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	200.000.000	200.000.000		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah								5.500.000.000	5.500.000.000	1.506.668.150	27,39
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	5.500.000.000	5.500.000.000		
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor								7.000.000.000	7.000.000.000	450.375.000	6,43
		Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	Paket	10	4	0	4	40%	7.000.000.000	7.000.000.000		
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional								3.150.000.000	3.150.000.000	2.919.512.400	92,68
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	5	5	0	5	100%	3.150.000.000	3.150.000.000		
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas								800.000.000	800.000.000	38.055.000	4,76
		Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Set	900	12	0	12	1,33%	800.000.000	800.000.000		
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal								241.000.000	241.000.000	19.808.600	8,22
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	40	6	0	6	15%	241.000.000	241.000.000		
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah								250.000.000	250.000.000	9.976.500	3,99
		Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	4	2	0	2	50%	250.000.000	250.000.000		
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran								1.700.000.000	1.700.000.000	407.499.500	23,97
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	3	3	6	50%	1.700.000.000	1.700.000.000		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah								9.500.000.000	9.500.000.000	1.300.163.491	13,69
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	Bulan	12	3	3	6	50%	9.500.000.000	9.500.000.000		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah								4.500.000.000	4.500.000.000	1.485.134.754	33,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	3	3	6	50%	4.500.000.000	4.500.000.000		
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah								530.000.000	530.000.000	176.817.700	33,36
		Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	Bulan	12	3	3	6	50%	530.000.000	530.000.000		
	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	%	85	100	100	100	118%				
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								175.000.000	175.000.000	102.820.000	58,75
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	Dokumen	1	1	0	1	100%	175.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100.000.000	100.000.000	41.428.000	41,43
		Jumlah laporan evaluasi Setda	Dokumen	1	1	0	1	100%	100.000.000			

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	FUNGSI LAINNYA											
	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	%	100	0	0	0	0%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	100	20	40	40	40%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	%	100	0	0	0	0%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%	100	0	0	0	0%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	%	100	20	40	40	40%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	100	0	0	0	0%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	20	40	40	40%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	%	85	0	0	0	0%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	%	80	0	0	0	0%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	85	20	20	20	23,53%				
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	85	0	30	30	35,29%				
		Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100%				
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset								125.000.000	125.000.000	9.349.500	7,48
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	Dokumen	1	0	0	0	0%	125.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan								250.000.000	250.000.000	30.011.200	12,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	2	0	0	0	0%	250.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM								500.000.000	500.000.000	168.222.000	33,64
		Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	4	1	1	2	50%	500.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan								500.000.000	500.000.000	162.769.617	32,55
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	Dokumen	5	0	0	0	0%	500.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi								300.000.000	300.000.000	52.744.800	17,58
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	3	0	0	0	0%	300.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan								123.000.000	123.000.000	55.417.000	45,05
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	Dokumen	3	1	1	2	67%	123.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata								165.000.000	165.000.000	72.917.300	44,19
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	2	0	0	0	0%	165.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan								100.000.000	100.000.000	-	0,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	100.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga								80.000.000	80.000.000	25.337.936	31,67
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	1	0	0	0	0%	80.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan								100.000.000	100.000.000	8.405.000	8,41
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	Dokumen	2	1	1	2	100%	100.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan								100.000.000	100.000.000	500.000	0,50

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	Dokumen	1	0	1	1	100%	100.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi								100.000.000	100.000.000	9.476.000	9,48
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	1	0	0	0	0%	100.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.								100.000.000	100.000.000	-	0,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	0	0	0	0%	100.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil								100.000.000	100.000.000	12.375.000	12,38
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Dokumen	1	0	0	0	0%	100.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang								400.000.000	400.000.000	73.996.000	18,50
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	3	0	0	0	0%	400.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								400.000.000	400.000.000	59.480.200	14,87
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	3	0	0	0	0%	400.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan								200.000.000	200.000.000	36.183.523	18,09
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	0	0	0	0%	200.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral								200.000.000	200.000.000	5.550.000	2,78
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	2	0	0	0	0%	200.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan								350.000.000	350.000.000	16.932.200	4,84
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	3	0	0	0	0%	350.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan								100.000.000	100.000.000	7.031.563	7,03
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	Dokumen	2	0	0	0	0%	100.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan								200.000.000	200.000.000	62.908.700	31,45
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Dokumen	2	0	0	0	0%	200.000.000			
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan								64.000.000	64.000.000	1.200.000	1,88
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	0	0	0	0%	64.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri								1.461.700.000	1.461.700.000	614.861.000	42,06
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	Dokumen	1	0	0	0	0%	461.700.000			
		Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	Dokumen	50	0	0	0	0%	1.000.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri								1.465.400.000	1.465.400.000	171.910.549	11,73
		Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	Dokumen	1	0	0	0	0%	1.000.000.000			
		Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	%	100	100	100	100	100%	465.400.000			
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan											
		Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	91								
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-	%	91								
	Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah								1.470.000.000	1.470.000.000	485.458.900	33,02
		Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Raperda	15	4	4	8	53%	920.000.000			
		Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Dokumen	110	157	103	260	236%	550.000.000			
	Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah								600.000.000	600.000.000	125.568.500	20,93
		Jumlah produk hukum yang dikaji	Dokumen	13	7	4	11	85%	325.000.000			
		Jumlah produk hukum yang disosialisasi	Dokumen	3	0	0	0	0%	275.000.000			
	Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah											
		Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	%	73								

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	%	91								
		Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%	82								
		Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%	73								
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	91								
		Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%	42								
		Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	23								
		Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	91								
		Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	%	82								
		Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%	85								
		Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	85								
		Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	%	85								
		Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%	85								
		Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	%	85								
		Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	90								
		Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	89								
		Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	85								
		Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%	100								
		Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	90								
		Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%	87								
		Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%	84								
		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	67.99								
		Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%	74								
		Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	87								
		Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%	91								
		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	%	91								
		Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	12.16								
		presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	45								
	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah								1.200.000.000	1.200.000.000	180.617.700	15,05
		Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	87	87,5	93,94	93,94	107,98%	400.000.000			
		Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	87	67,72	83,81	83,81	96,33%	400.000.000			
		Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	87	100	100	100	114,94%	400.000.000			
	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah								825.000.000	825.000.000	128.021.500	15,52
		Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	%	85	6,81	6,81	6,81	8,01%	825.000.000			
	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah								1.200.000.000	1.200.000.000	113.206.250	9,43
		Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	%	82	66,25	83,04	83,04	101,27%	600.000.000			
		Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	%	82	66,35	86,22	86,22	105,15%	600.000.000			
	Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan								1.150.000.000	1.150.000.000	385.868.100	33,55
		Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	Laporan	12	3	3	6	50%	575.000.000			
		Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	Laporan	12	3	3	6	50%	575.000.000			
	Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah								1.500.000.000	1.500.000.000	587.953.000	39,20
		Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	Dokumen	1	1	0	1	100%	1.400.000.000			
		Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0%	100.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan								550.000.000	550.000.000	112.109.025	20,38
		jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	2	0	0	0	0%	550.000.000			

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT								1.000.000.000	1.000.000.000	189.963.658	19,00
		jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	Dokumen	2	0	0	0	0%	1.000.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM								500.000.000	500.000.000	179.298.000	35,86
		jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	3	0	0	0	0%	500.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Keuangan								400.000.000	400.000.000	49.249.000	12,31
		jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	Dokumen	4	1	0	1	25%	400.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Jasa dan Produksi								250.000.000	250.000.000	36.916.150	14,77
		jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	3	0	0	0	0%	250.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan								264.000.000	264.000.000	29.576.500	11,20
		jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	Dokumen	2	0	1	1	50%	264.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata								180.000.000	180.000.000	11.639.000	6,47
		jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	2	0	0	0	0%	180.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan								530.000.000	530.000.000	45.516.870	8,59
		Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Dokumen	1	0	0	0	0%	530.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga								320.000.000	320.000.000	55.662.577	17,39
		Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	1	0	0	0	0%	320.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan								700.000.000	700.000.000	230.965.557	33,00
		Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	Dokumen	4	1	1	2	50%	700.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan								680.000.000	680.000.000	266.148.617	39,14
		Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	0%	680.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi								430.000.000	430.000.000	37.937.850	8,82
		Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	1	0	0	0	0%	430.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								500.000.000	500.000.000	180.279.679	36,06
		Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	0	0	0	0%	500.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil								650.000.000	650.000.000	141.059.825	21,70
		Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil	Dokumen	1	0	0	0	0%	650.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan								310.000.000	310.000.000	53.248.200	17,18
		jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	4	0	0	0	0%	310.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral								290.000.000	290.000.000	63.169.500	21,78
		jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	Laporan	1	0	0	0	0%	290.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan								220.000.000	220.000.000	26.293.000	11,95
		jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	Laporan	3	0	0	0	0%	220.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan								300.000.000	300.000.000	14.405.000	4,80
		jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	Laporan	2	0	0	0	0%	300.000.000			

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan								1.070.000.000	1.070.000.000	79.769.000	7,46
		jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Laporan	6	0	0	0	0%	1.070.000.000			
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota								506.000.000	506.000.000	166.327.850	32,87
		Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan	Kabupaten/Kota	35	9	8	17	48,57%	506.000.000			
	Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah								748.000.000	748.000.000	86.134.550	11,52
		Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	OPD	48	13	10	23	47,92%	748.000.000			
	Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan								602.000.000	602.000.000	128.106.400	21,28
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	Kabupaten/Kota	35	9	8	17	48,57%	277.000.000			
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	OPD	48	13	0	13	27,08%	325.000.000			
	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik								1.228.000.000	1.228.000.000	224.679.700	18,30
		jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	Kabupaten/Kota	35	0	16	16	45,71%	350.000.000			
		Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	Unit	100	50	0	50	50,00%	878.000.000			
	Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan								1.010.000.000	1.010.000.000	105.690.155	10,46
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Kabupaten/Kota	35	8	7	15	42,86%	250.234.000			
		Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Unit	240	55	60	115	47,92%	759.766.000			
	Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas								888.000.000	888.000.000	127.336.500	14,34
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	Kabupaten/Kota	35	8	8	16	45,71%	290.000.000	317.000.000		
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	OPD	48	12	12	24	50,00%	290.000.000	410.000.000		
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	Kabupaten/Kota	35	8	8	16	45,71%	165.000.000			
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	OPD	48	12	12	24	50,00%	143.000.000			
	Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi								317.000.000	317.000.000	63.742.383	20,11
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	OPD	48	41	0	41	85,42%	317.000.000			
	Kegiatan Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota								1.130.000.000	1.130.000.000	362.231.200	32,06
		Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	Dokumen	123	41	24	65	52,85%	550.000.000			
		Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	Dokumen	127	55	36	91	71,65%	580.000.000			
	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah								850.000.000	850.000.000	123.002.600	14,47
		Jumlah produk hukum yang didokumentasi	Dokumen	90	9	31	40	44,44%	350.000.000			
		Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	Dokumen	65	9	26	35	53,85%	250.000.000			
		Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	Buku	150	60	0	60	40,00%	250.000.000			
	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum								1.550.000.000	1.550.000.000	454.236.100	29,31
		Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	190	48	0	48	25,26%	500.000.000			
		Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	Perkara	9	5	5	10	111,11%	650.000.000			
		Penanganan sengketa hukum	Sengketa	5	1	1	2	40,00%	400.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK								610.000.000	610.000.000	113.165.300	18,55
		Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	Laporan	1	0	0	0	0,00%	222.000.000			
		Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	Kabupaten/Kota	35	0	0	0	0,00%	388.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								350.000.000	350.000.000	21.651.200	6,19
		jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Laporan	4	0	0	0	0	350.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								300.000.000	300.000.000	30.478.000	10,16
		jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4	0	0	0	0%	300.000.000			
	Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan								800.000.000	800.000.000	269.599.982	33,70
		Jumlah Dokumen SHB dan ASB	Dokumen	2	0,05	1	1,05	52,50%	800.000.000			

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa								600.000.000	600.000.000	110.568.569	18,43
		Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	%	100	19,24	37	56,24	56,24%	600.000.000			
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik								550.000.000	550.000.000	63.047.349	11,46
		Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	%	100	37,06	50	87,06	87,06%	200.000.000			
		Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	%	100	4,12	50	54,12	54,12%	350.000.000			
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa								985.000.000	985.000.000	193.189.954	19,61
		Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	100	7,44	50	57,44	57,44%	685.000.000			
		Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	%	71	5,38	25	30,38	42,79%	300.000.000			
	Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa								350.000.000	350.000.000	117.928.065	33,69
		Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	%	100	24,13	56	80,13	80,13%	350.000.000			
	Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa								650.000.000	650.000.000	155.421.377	23,91
		Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100,00%	650.000.000			
	Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota								410.000.000	410.000.000	20.205.000	4,93
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB	Kabupaten/Kota	35	0	0	0	0,00%	410.000.000			
	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa								1.350.000.000	1.350.000.000	511.820.013	37,91
		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	100	42	81	81	81,00%	1.350.000.000			
	Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah											
		Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	85	17	34	34	40				
		Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	85	17	34	34	40				
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	0	0	0	0				
		Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	85	0	0	0	0				
		Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	83	40	0	0	0				
		Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	0	100	100	100				
		Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	82	0	0	0	0				
		Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	85	0	0	0	0				
		Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	85	0	0	0	0				
		Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	85	0	0	0	0				
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran								100.000.000	100.000.000	7.940.500	7,94
		Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	Laporan	1	0	0	0	0	100.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan								200.000.000	200.000.000	25.799.278	12,90
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	0	0	0	0	200.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM								500.000.000	500.000.000	244.824.000	48,96
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	4	1	0	1	25	500.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan								410.000.000	410.000.000	74.010.172	18,05

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	Dokumen	1	0	0	0	0	410.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi								250.000.000	250.000.000	48.485.500	19,39
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	2	0	0	0	0	250.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan								68.000.000	68.000.000	-	0,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	Dokumen	1	0	0	0	0	68.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata								150.000.000	150.000.000	-	0,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen		0	0	0	0	150.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan								300.000.000	300.000.000	87.465.700	29,16
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Laporan	1	0	0	0	0	300.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga								125.000.000	125.000.000	12.709.416	10,17
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	1	0	0	0	0	125.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan								160.000.000	160.000.000	3.592.000	2,25
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	Dokumen	1	0	0	0	0	160.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi								100.000.000	100.000.000	23.540.189	23,54
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	1	0	0	0	0	100.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								125.000.000	125.000.000	23.700.982	18,96
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	0	0	0	0	125.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil								125.000.000	125.000.000	13.033.500	10,43
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	Dokumen	1	0	0	0	0	125.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum								100.000.000	100.000.000	13.324.000	13,32
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas	Laporan	1	0	1	1	100	100.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								250.000.000	250.000.000	11.202.000	4,48
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	2	0	0	0	0	250.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman								125.000.000	125.000.000	13.638.000	10,91
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	2	0	0	0	0	125.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan								125.000.000	125.000.000	-	0,00

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	1	0	0	0	0	125.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral								125.000.000	125.000.000	33.637.000	26,91
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	Laporan	1	0	0	0	0	125.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan								150.000.000	150.000.000	7.883.500	5,26
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan	Laporan	1	0	0	0	0	150.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan								185.000.000	185.000.000	17.237.600	9,32
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	Laporan	1	0	0	0	0	185.000.000			
	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan								175.000.000	175.000.000	17.361.500	9,92
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Laporan	2	0	0	0	0	175.000.000			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	100	0	0	0	0				
		Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	100	0	0	0	0				
	Kegiatan administrasi penataan wilayah								689.000.000	689.000.000	167.117.425	24,26
		Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	144.500.000			
		Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	Dokumen	1	0	0	0	0	144.500.000			
		Jumlah dokumen penegasan batas daerah	Dokumen	2	0	0	0	0	400.000.000			
	Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan								340.000.000	340.000.000	65.942.100	19,39
		Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	1	0	0	0	0	340.000.000			
	Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu								585.000.000	585.000.000	146.696.800	25,08
		Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	Laporan	1	0	0	0	0	300.000.000			
		Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	Laporan	1	0	0	0	0	285.000.000			
	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan								685.000.000	685.000.000	212.764.400	31,06
		Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	Wilayah	36	0	0	0	0	285.000.000			
		Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	Wilayah	36	0	0	0	0	200.000.000			
		Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	Wilayah	36	0	0	0	0	200.000.000			
	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah											
		Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%	100	100	0	0	0				
		Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	0	0	0	0				
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah								1.243.800.000	1.243.800.000	514.084.240	41,33
		Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	Dokumen	13	0	0	0	0	600.000.000			
		Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota	Dokumen	1	0	0	0	0	643.800.000			
	Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD								707.000.000	707.000.000	162.248.800	22,95
		Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH	Dokumen	21	2	0	2	9,52	507.000.000			
		Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD	Dokumen	5	3	0	3	60	200.000.000			
	Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan											
		Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	%	100	20	40	40	40				
		Persentase layanan liputan dan keprotokolan	%	100	100	100	100	100				
		Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	100	100				

No	Urusan/Program/ Kegiatan	Indiktor Kinerja	Satuan	Kinerja					Keuangan			
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja		Realisasi Kinerja s.d. Triwulan II	Tingkat Capaian (%)	Pagu Indikatif		Realisasi Keuangan s.d. Triwulan II (Rp)	Tingkat Capaian (%)
					Triwulan I	Triwulan II			Renja Tahun 2020	APBD Tahun 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah								770.000.000	770.000.000	27.780.500	3,61
		Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	3	0	0	0	0	770.000.000			
	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah								450.000.000	450.000.000	187.096.500	41,58
		Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah	Laporan	1200	250	360	610	50,83	450.000.000			
	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan								5.700.000.000	5.700.000.000	1.276.873.430	22,40
		Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	Bulan	12	3	3	6	50	5.700.000.000			
	Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum								550.000.000	550.000.000	-	0,00
		Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	Laporan	2	0	0	0	0	550.000.000			
	Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah								2.650.000.000	2.650.000.000	987.037.295	37,25
		Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	Bulan	12	3	3	6	50	2.650.000.000			
	Kegiatan Keprotokolan								1.850.000.000	1.850.000.000	647.824.472	35,02
		Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	Laporan	12	3	3	6	50	1.850.000.000			
	Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah								1.590.000.000	1.590.000.000	168.690.050	10,61
		Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Laporan	12	3	3	6	50	1.590.000.000			
	Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan								4.525.000.000	4.525.000.000	700.008.500	15,47
		jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	Dokumen	1	0	0	0	0	2.200.000.000			
		jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	Laporan	1	0	0	0	0	2.325.000.000			
	Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah								7.000.000.000	14.275.000.000	3.083.534.323	44,05
		Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	Paket	144	36	36	72	50	7.000.000.000			

Evaluasi kinerja kegiatan dan program merupakan penilaian atas keluaran (output) kinerja kegiatan dan hasil (outcome) kinerja program sampai dengan TW II merupakan progres sementara dan belum mencerminkan hasil akhir.

Capaian kinerja program dan kegiatan Setda Provinsi Jawa Tengah akan didapat atau dievaluasi pada triwulan keempat (akhir tahun). Pengendalian pencapaian target akan dilakukan secara periodik dan melibatkan seluruh komponen pelaksana biro-biro di lingkup Setda Provinsi Jawa Tengah. Capaian kinerja akhir tahun akan dilaporkan pada LKjIP Setda Provinsi Jawa Tengah tahun 2020.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Guna memecahkan permasalahan serta menangani berbagai isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah, yaitu:

”Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”.

Adapun sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Berikut target kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang dituangkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

No	Tujuan dan Sasaran	Indiktor Kinerja	Satuan	Target Renja Tahun 2020	Target Perubahan Renja Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	81	81
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	81	81
		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	76	76
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	85	85
		Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	85	85
		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	75	75
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	85	85
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealiasi	%	85	85
		Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	91	91
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	87	87
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	82	82
		Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	82	82

No	Tujuan dan Sasaran	Indiktor Kinerja	Satuan	Target Renja Tahun 2020	Target Perubahan Renja Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	81	81
		Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	91	91
		peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	91	91
		Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	91	91
		Nilai Kematangan Organisasi Daerah	%	22	22
		presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	64.32	64.32
		Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	78	78
		Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	40	40
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	84	84
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	85	85
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	89	89
		Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	63	63
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85	85
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	84	84
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	85	85
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	100	100
		Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	100
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100	100

No	Tujuan dan Sasaran	Indiktor Kinerja	Satuan	Target Renja Tahun 2020	Target Perubahan Renja Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	76
Permasalahan: Indikator Tujuan dan Sasaran merupakan impact atas capaian kinerja program dan kegiatan sehingga tidak dimungkinkan evaluasi secara triwulanan					
Tindak Lanjut: Evaluasi indikator tujuan dan sasaran akan dilaporkan pada LKjIP					

3.2 Program dan Kegiatan

Guna mewujudkan target kinerja tujuan dan sasaran tersebut, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 merencanakan pelaksanaan sejumlah program, yaitu:

1. Sasaran Pertama, Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah akan diwujudkan melalui dua program, yaitu: Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
2. Sasaran Kedua, Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan diwujudkan melalui empat program, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Program Peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, Program Adminstrasu Penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. Sasaran Ketiga, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah akan diwujudkan melalui tiga program, yaitu: Program Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan; Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah; dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Berikut rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020 berikut dengan indikator kinerja program, target, dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4	**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																										
4.06	**FUNGSI LAINNYA**																										
4.06.15	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	85					7.484.100	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	85					2.407.833		8.428.000		Biro Perekonomian Daerah
					Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	85									Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	85									
					Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	75									Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	75									
4.06.15.001	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	85	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	85%	125.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	85	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	85%	13.830	1 Dokumen	100.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
4.06.15.002	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	85%	250.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	85%	32.322	2 Dokumen	250.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.15.003	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM							Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	4 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	85%	500.000							Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	85%	189.422	4 Dokumen	500.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.06.15.004	Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	5 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	85%	500.000							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	3 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	85%	180.420	5 Dokumen	600.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG KEUANGAN
4.06.15.005	Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	3 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	85%	300.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	85%	78.950	3 Dokumen	320.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG JASA DAN PRODUKSI
4.06.15.006	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	3 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80%	123.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80%	59.392	3 Dokumen	168.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PERHUBUNGAN
4.06.15.007	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80%	165.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80%	73.730	2 Dokumen	220.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.15.008	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	100.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	7.500	1 Dokumen	150.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PERPUSTAKAAN
4.06.15.009	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100%	80.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100%	31.982	1 Dokumen	150.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.06.15.010	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	100%	100.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	100%	34.400	2 Dokumen	150.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
4.06.15.011	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	100.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	4.240	1 Dokumen	150.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KESEHATAN
4.06.15.012	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	100.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100%	34.226	1 Dokumen	150.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.15.013	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100%	100.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100%	1.000	1 Dokumen	150.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.06.15.014	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100%	100.000							Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	100%	28.260	1 Dokumen	150.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.06.15.016	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100%	400.000							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100%	193.366	3 Dokumen	400.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.06.15.017	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100%	400.000							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	100%	111.415	3 Dokumen	400.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.06.15.018	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100%	200.000							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100%	54.483	2 Dokumen	200.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;	SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020						Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.15.019	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100%	200.000							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	100%	28.623	2 Dokumen	200.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.06.15.020	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	3 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100%	350.000							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100%	104.607	2 Dokumen	150.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN KETAHANAN PANGAN
4.06.15.021	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100%	100.000							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100%	22.131	2 Dokumen	150.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.15.022	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	2 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100%	200.000							Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	100%	80.749	3 Dokumen	200.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.06.15.023	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	85	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	100%	64.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	85	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	100%	17.738	1 Dokumen	150.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4.06.15.024	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	75	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	1 Dokumen	Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	461.700	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	75	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	1 Dokumen	Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	311.900	1 Dokumen	600.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI
								Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	50 Dokumen			1.000.000							Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	25 Dokumen			414.012	50 Dokumen	1.092.000		
4.06.15.025	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	75	Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	1 Dokumen	Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	1.000.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	75	Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	1 Dokumen	Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	170.481	1 Dokumen	1.078.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI
								Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	100%			465.400							Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	100%			128.654	100%	600.000		
4.06.16	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	91					2.070.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	91					1.433.445		2.316.000		Biro Hukum

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.16.026	Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	91	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	15 Raperda	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	93%	920.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	91	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	15 Raperda	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	93%	592.345	16 Raperda	810.600	BiroHukum; JAWA TIMUR; SUMATERA UTARA; JAWA BARAT; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; BALI; DKI JAKARTA; TEGAL; WONOGIRI; KUDUS; BREBES; KOTA TEGAL; KOTA SURAKARTA; BLORA; TEMANGGUNG; REMBANG; KEBUMEN; BATANG; KOTA SEMARANG; KOTA SALATIGA; BOYOLALI; KLATEN; PEMALANG; KENDAL; CILACAP; PATI; KOTA MAGELANG; KOTA PEKALONGAN;	SUB BAGIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
								Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	110 Dokumen			550.000							Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	300 Dokumen			592.000	120 Dokumen	810.600		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.16.027	Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77				Jumlah produk hukum yang dikaji	13 Dokumen			325.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77				Jumlah produk hukum yang dikaji	15 Dokumen			248.843	14 Dokumen	347.400	Biro Hukum; JAWA BARAT; DKI JAKARTA; JAWA TIMUR; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; BALI; SUMATERA UTARA; KOTA SURAKARTA; DEMAK; PURWOREJO; PURBALINGGA; KENDAL; BANYUMAS; KOTA SALATIGA; PEKALONGAN; TEMANGGUNG; KOTA MAGELANG; KUDUS; PEMALANG; GROBOGAN; SRAGEN; KOTA PEKALONGAN; REMBANG; WONOSOBO; KLATEN; MAGELANG; PATI; BLORA;	SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM
								Jumlah produk hukum yang disosialisasi	3 Dokumen			275.000							Jumlah produk hukum yang disosialisasi	3 Dokumen			257	4 Dokumen	347.400		
4.06.17	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	82					30.803.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	82					12.130.150		36.482.670		Biro Perekonomian Daerah
					Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	82									Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	82									
					Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	81									Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	81									
					peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	91									peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	91									
					Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	22									Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	22									

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
					presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	64.32									presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	64.32									
					Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	78									Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	78									
					Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	40									Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	40									
4.06.17.001	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	82	Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87%	Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	84%	400.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	82	Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87%	Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	84%	138.040	88%	400.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN,SOSIAL DAN BUDAYA
								Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87%			400.000							Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87%			88.528	88%	400.000		
								Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87%			400.000							Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	87%			88.528	88%	400.000		
4.06.17.002	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	82	Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	85%	Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	84%	825.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	82	Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	85%	Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	84%	199.363	86%	1.100.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
4.06.17.003	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jawa Tengah									Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	84%										Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	84%				Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH I
4.06.17.004	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	82	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	82%	Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	80%	600.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	82	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	80%	Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	80%	105.295	83%	700.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH I

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
								Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	82%			600.000								Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	80%			105.296	83%	700.000		
4.06.17.005	Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/Kota									Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	80%										Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	80%				Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH II
4.06.17.006	Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	81	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	12 Laporan	Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	87%	575.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	81	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	12 Laporan	Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	87%	220.000	12 Laporan	500.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	12 Laporan			575.000							Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	12 Laporan			382.341	12 Laporan	500.000		
4.06.17.007	Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	81	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	1 Dokumen	Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	100%	1.400.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	81	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	1 Dokumen	Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	100%	1.069.195	1 Dokumen	1.550.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
								Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			100.000							Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			50.000	1 Dokumen	100.000		
4.06.17.008	Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota									Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	87%										Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	87%				Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.06.17.009	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan							jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	89%	550.000							jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	89%	187.252	2 Dokumen	700.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.06.17.010	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT							jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	2 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	89%	1.000.000							jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	2 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	89%	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.17.011	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM							jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	3 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	89%	500.000							jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	89%	200.423	3 Dokumen	550.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.06.17.012	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Keuangan							jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	4 Dokumen	Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	90%	400.000							jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	1 Dokumen	Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	90%	66.031	4 Dokumen	650.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG KEUANGAN
4.06.17.013	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Jasa dan Produksi							jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	3 Dokumen	Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	90%	250.000							jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	1 Dokumen	Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	90%	60.000	3 Dokumen	650.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG JASA DAN PRODUKSI
4.06.17.014	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan							jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	2 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	90%	264.000							jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	90%	34.838	2 Dokumen	280.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PERHUBUNGAN
4.06.17.015	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata							jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	90%	180.000							jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	90%	27.655	2 Dokumen	250.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA
4.06.17.016	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan							Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	530.000							Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	85.00.%	142.415	1 Dokumen	600.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PERPUSTAKAAN
4.06.17.017	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga							Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	320.000							Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	92.357	1 Dokumen	350.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.17.018	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan							Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	4 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	700.000							Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	4 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	350.940	4 Dokumen	700.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
4.06.17.019	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan							Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	680.000							Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	307.218	1 Dokumen	750.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KESEHATAN
4.06.17.020	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi							Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	430.000							Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	105.335	1 Dokumen	450.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.06.17.021	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	500.000							Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	251.095	1 Dokumen	600.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.06.17.022	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil							Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	650.000							Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil	1 Dokumen	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	278.540	1 Dokumen	700.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.06.17.024	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan							jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	310.000							jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	66.945	4 Laporan	310.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.17.025	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral							jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	1 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	290.000							jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	1 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	95.019	3 Laporan	290.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.06.17.026	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan							jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	3 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	220.000							jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	1 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	72.809	3 Laporan	250.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN KETAHANAN PANGAN
4.06.17.027	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan							jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	2 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	300.000							jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	1 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	73.320	2 Laporan	300.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.06.17.028	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan							jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	6 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	1.070.000							jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	1 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	152.039	7 Laporan	800.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.06.17.029	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota				Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	22	Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	35 Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	#####	506.000				Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	22	Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	35 Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	51,43%	185.921	35 Kabupaten/Kota	588.500	Biro Organisasi	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN KAB/KOTA
4.06.17.030	Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	22	Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	48 OPD	presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	100%	748.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	22	Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	48 OPD	presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	100%	182.877	48 OPD	850.000	Biro Organisasi	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
4.06.17.031	Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	22	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	35 Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	84%	277.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	22	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	35 Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	84%	52.000	35 Kabupaten/Kota	347.750	Biro Organisasi	SUB BAGIAN ANALISIS DAN FORMASI JABATAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
								Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	48 OPD			325.000							Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	48 OPD			110.789	48 OPD	347.750		
4.06.17.032	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	64.32	jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	35 Kabupaten/Kota	Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	#####	350.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	64.32	jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	35 Kabupaten/Kota	Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	30,36%	103.000	35 Kabupaten/Kota	675.000	Biro Organisasi	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK
								Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	100 Unit			878.000							Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	100 Unit			300.581	100 Unit	675.000		
4.06.17.033	Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	64.32	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	35 Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	#####	250.234	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	64.32	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	35 Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	67,99%	174.000	35 Kabupaten/Kota	575.000	Biro Organisasi	SUB BAGIAN TATALAKSANA
								Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	240 Unit			759.766							Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	240 Unit			100.277	240 Unit	575.000		
4.06.17.034	Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	78	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	35 Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	100%	290.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	78	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	35 Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	100%	58.500	35 Kabupaten/Kota	367.500	Biro Organisasi;	SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA
								Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	48 OPD			290.000							Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	48 OPD			58.500	48 OPD	367.500		
								Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	35 Kabupaten/Kota			165.000							Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	35 Kabupaten/Kota			23.585	35 Kabupaten/Kota	167.500		
								Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	48 OPD			143.000							Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	48 OPD			23.000	48 OPD	167.500		
4.06.17.035	Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	78	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	48 OPD	Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	85%	317.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	78	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	48 OPD	Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	85%	80.669	48 OPD	354.200	Biro Organisasi	SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020						Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.17.036	Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77				Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	123 Dokumen	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	91%	550.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77				Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	90 Dokumen	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	91.00.%	344.256	128 Dokumen	633.000	Biro Hukum; JAWA BARAT; JAWA TIMUR; DKI JAKARTA; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; JEPARA; KLATEN; KOTA TEGAL; BREBES; KUDUS; KOTA MAGELANG; KOTA SEMARANG; CILACAP; SRAGEN; TEMANGGUNG; KEBUMEN; SEMARANG; PEKALONGAN; REMBANG; WONOGIRI; KOTA PEKALONGAN; BOYOLALI; PATI; DEMAK; WONOSOBO; BANJARNEGARA; KENDAL; TEGAL;	SUB BAGIAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH WILAYAH I
								Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	127 Dokumen			580.000							Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	95 Dokumen			349.256	132 Dokumen	633.000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.17.037	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	91	Jumlah produk hukum yang didokumentasi	90 Dokumen	Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	91%	350.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	91	Jumlah produk hukum yang didokumentasi	90 Dokumen	Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	91%	182.644	90 Dokumen	350.000	Biro Hukum; DKI JAKARTA; JAWA BARAT; BREBES; KOTA SALATIGA; WONOSOBO; KOTA MAGELANG; JEPARA; MAGELANG; PEMALANG; SEMARANG; KOTA SEMARANG; GROBOGAN; PURWOREJO ; CILACAP; SRAGEN; PURBALINGGA; KEBUMEN; KLATEN; KOTA SURAKARTA; KOTA PEKALONGAN; KARANGANYAR; BANJARNEGARA; TEGAL; BLORA; BANYUMAS; BOYOLALI; BATANG; PATI; KUDUS;	SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
								Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	65 Dokumen			250.000							Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	45 Dokumen			100.000	70 Dokumen	275.000		
								Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	150 Buku			250.000							Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	60 Buku			9.903	150 Buku	250.000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020										Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.17.038	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77				Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	190 Perkara	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	91%	500.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77				Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	100 Perkara	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	91%	250.700	200 Perkara	750.000	Biro Hukum; JAWA TIMUR; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; JAWA BARAT; DKI JAKARTA; KOTA SEMARANG; BOYOLALI; KUDUS; PATI; PEMALANG; KOTA PEKALONGAN; KARANGANYAR; BREBES; PURBALINGGA; BLORA; PEKALONGAN; SEMARANG; JEPARA; MAGELANG; SUKOHARJO; KOTA SURAKARTA; TEGAL; WONOSOBO; REMBANG; TEMANGGUNG; KOTA SALATIGA; KEBUMEN; KOTA TEGAL; WONOGIRI;	SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM
								Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	9 Perkara			650.000							Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	13 Perkara			545.444	9 Perkara	750.000		
								Penanganan sengketa hukum	5 Sengketa			400.000							Penanganan sengketa hukum	5 Sengketa			138.894	6 Sengketa	336.000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.17.039	Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77				Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	1 Laporan	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	91%	222.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77				Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	1 Laporan	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	91%	320	1 Laporan	379.000	Biro Hukum; JAWA BARAT; JAWA TIMUR; DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA; DKI JAKARTA; PATI; KOTA PEKALONGAN; PEKALONGAN; SUKOHARJO; GROBOGAN; WONOGIRI; BANYUMAS; KOTA TEGAL; PURBALINGGA; JEPARA; DEMAK; KENDAL; CILACAP; KOTA SEMARANG; BATANG; BREBES; KUDUS; BANJARNEGARA; TEMANGGUNG; REMBANG; MAGELANG; SEMARANG; KOTA	SUB BAGIAN SENGKETA HUKUM DAN HAM
								Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	35 Kabupaten/Kota			388.000							Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	35 Kabupaten/Kota			161.000	35 Kabupaten/Kota	379.000		
4.06.17.040	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	4 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	350.000							jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	44.680	4 Laporan	350.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.06.17.041	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	300.000							jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	85%	45.468	4 Laporan	300.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.06.17.042	Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan							Jumlah Dokumen SHB dan ASB	2 Dokumen	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	91%	800.000							Jumlah Dokumen SHB dan ASB	2 Dokumen	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	91%	404.183	2 Dokumen	850.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN STANDARISASI PENGADAAN
4.06.17.043	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa							Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	100%	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	91%	600.000							Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	100%	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	91%	269.411	100%	800.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	SUB BAGIAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.17.044	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik							Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	100%	Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	73%	200.000							Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	100%	Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	73%	72.503	100%	400.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LPSE
								Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	100%			350.000							Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	100%			72.503	100%	400.000		
4.06.17.045	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa							Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	73%	685.000							Persentase sistemInformasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	73%	361.335	100%	1.050.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	SUB BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA
								Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	71%			300.000							Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	71%			144.354	72%	400.000		
4.06.17.046	Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa							Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	100%	Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	73%	350.000							Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	100%	Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	73%	191.589	100%	600.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	SUB BAGIAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA
4.06.17.047	Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa							Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	100%	Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	73%	650.000							Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	100%	Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	73%	319.750	100%	1.000.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	SUB BAGIAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA
4.06.17.048	Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota				Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	40	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB	35 Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	45%	410.000				Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	40	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB	35 Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	45%	54.637	35 Kabupaten/Kota	509.470	Biro Organisasi	SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI
4.06.17.049	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa							Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	91%	1.350.000							Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	100%	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	91%	602.802	100%	2.500.000	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85					3.848.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85					1.075.111		4.985.000		Biro Umum
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100									Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100									
4.06.18.001	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85	Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	1 Laporan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	100.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85	Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	1 Laporan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	9.362	1 Laporan	200.000	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
4.06.18.002	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	83%	200.000							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	83%	27.392	1 Dokumen	250.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.06.18.003	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	4 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	83%	500.000							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	83%	249.234	4 Dokumen	375.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.06.18.004	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	1 Dokumen	Persentase tingkat kesehatan BUMD	82%	410.000							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	1 Dokumen	Persentase tingkat kesehatan BUMD	82%	125.935	1 Dokumen	440.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG KEUANGAN
4.06.18.005	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	2 Dokumen	Persentase tingkat kesehatan BUMD	82%	250.000							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	1 Dokumen	Persentase tingkat kesehatan BUMD	82%	62.321	2 Dokumen	350.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG JASA DAN PRODUKSI

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.18.006	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	68.000							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	30.365	1 Dokumen	200.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PERHUBUNGAN
4.06.18.007	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	150.000							Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	26.821	2 Dokumen	200.000	Biro Perekonomian Daerah	SUB BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA
4.06.18.008	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	1 Laporan	Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	300.000							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	1 Laporan	Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	155.190	1 Laporan	325.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PERPUSTAKAAN
4.06.18.009	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	125.000							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85.00.%	33.922	1 Dokumen	200.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.06.18.010	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	160.000							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	20.012	1 Dokumen	250.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KESEHATAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.18.011	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	100.000							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	28.081	1 Dokumen	200.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.06.18.012	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	125.000							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	24.230	1 Dokumen	195.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.06.18.013	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	125.000							Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	1 Dokumen	Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	85%	35.770	1 Dokumen	150.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.06.18.015	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas	1 Laporan	Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	100.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas	1 Laporan	Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	13.499	1 Laporan	100.000	Biro Umum; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA
4.06.18.016	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	250.000							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	30.031	2 Laporan	300.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.18.017	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	125.000							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	30.330	2 Laporan	175.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.06.18.018	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	125.000							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	29.300	1 Laporan	200.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.06.18.019	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	125.000							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	42.014	1 Laporan	200.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.06.18.020	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	150.000							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	23.532	1 Laporan	225.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN KETAHANAN PANGAN
4.06.18.021	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	185.000							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	36.037	1 Laporan	225.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.06.18.022	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	2 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	175.000							jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	1 Laporan	Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100%	41.733	2 Laporan	225.000	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	SUB BAGIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.19	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100					2.299.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100					788.624		3.030.200		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
4.06.19.001	Kegiatan administrasi penataan wilayah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	1 Dokumen	Persentase tertib administrasi pemerintahan	100%	144.500	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	1 Dokumen	Persentase tertib administrasi pemerintahan	100%	55.000	1 Dokumen	200.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH
								Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	1 Dokumen			144.500							Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	1 Dokumen			55.000	1 Dokumen	200.000		
								Jumlah dokumen penegasan batas daerah	2 Dokumen			400.000							Jumlah dokumen penegasan batas daerah	1 Dokumen			142.052	2 Dokumen	600.000		
4.06.19.002	Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	Persentase tertib administrasi pemerintahan	100%	340.000				Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1 Laporan	Persentase tertib administrasi pemerintahan	100%	84.643	1 Laporan	500.200	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4.06.19.003	Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	1 Laporan	Persentase tertib administrasi pemerintahan	100%	300.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	1 Laporan	Persentase tertib administrasi pemerintahan	100%	160.000	1 Laporan	400.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERTANAHAN
								Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	1 Laporan			285.000							Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	1 Laporan			12.114	1 Laporan	400.000		
4.06.19.004	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	36 Wilayah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100%	285.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	100	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	36 Wilayah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100%	99.938	36 Wilayah	243.334	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
								Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah			200.000							Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah			89.938	36 Wilayah	243.333		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
								Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah			200.000							Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36 Wilayah			89.939	36 Wilayah	243.333		
4.06.20	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100					1.950.800	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100					952.864		3.500.000		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
4.06.20.001	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	13 Dokumen	Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	600.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	13 Dokumen	Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	587.279	13 Dokumen	1.000.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN EVALUASI KINERJA PEMDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH
								Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota	1 Dokumen			643.800							Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota	0 Dokumen			3.500	1 Dokumen	500.000		
4.06.20.002	Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100	Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH	21 Dokumen	Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100%	507.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	100	Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH	21 Dokumen	Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100%	299.085	21 Dokumen	1.600.000	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
								Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD	5 Dokumen			200.000							Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD	5 Dokumen			63.000	20 Dokumen	400.000		
4.06.21	Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76					25.085.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76					18.965.734		27.230.000		Biro Umum
4.06.21.001	Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	3 Laporan	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100%	770.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	1 Laporan	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100%	153.494	3 Laporan	790.000	Biro Umum; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO
4.06.21.002	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah	1200 Laporan	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100%	450.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah	1200 Laporan	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100%	212.423	1200 Laporan	550.000	Biro Umum; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN MATERI NASKAH PIMPINAN
4.06.21.003	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	12 Bulan	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100%	5.700.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	12 Bulan	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100%	2.302.785	12 Bulan	5.900.000	Biro Umum; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA GUBERNUR
4.06.21.004	Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	2 Laporan	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100%	550.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	1 Laporan	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	100%	53.750	2 Laporan	650.000	Biro Umum; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO
4.06.21.005	Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	12 Bulan	Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100%	2.650.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	12 Bulan	Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100%	2.158.842	12 Bulan	3.200.000	Biro Umum; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN LIPUTAN DAN DOKUMENTASI
4.06.21.006	Kegiatan Keprotokolan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	12 Laporan	Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100%	1.850.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	12 Laporan	Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100%	1.267.005	12 Laporan	1.950.000	Biro Umum; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PROTOKOL

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
4.06.21.008	Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	12 Laporan	Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100%	1.590.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	12 Laporan	Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100%	264.538	12 Laporan	2.040.000	Biro Umum; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS DAERAH
4.06.21.009	Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan							jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	1 Dokumen	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	100%	2.200.000							jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	1 Dokumen	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	100%	13.250	1 Dokumen	2.375.000	Biro Kesejahteraan Rakyat; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA
								jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	1 Laporan			2.325.000							jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	1 Laporan			1.177.755	1 Laporan	2.375.000		
4.06.21.010	Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	144 Paket	Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100%	7.000.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	168 Paket	Persentase layanan liputan dan keprotokolan	100%	11.361.892	144 Paket	7.400.000	Biro Umum; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN TATA PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA
0	**NON URUSAN**																										
0.00	**NON URUSAN**																										
0.00.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76					76.321.743	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76					44.701.423		84.825.935		Biro Umum
0.00.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	2.100.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	1.025.431	12 Laporan	2.200.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KEUANGAN
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	95.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	41.558	12 Bulan	108.765	OPD Provinsi	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah							Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	100%	30.000							Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	100%	18.000	12 Bulan	45.000	OPD Provinsi; SEMARANG	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	350.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	63.436	12 Bulan	375.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA SEKRETARIS DAERAH
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah							Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	45.000							Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	11.346	12 Bulan	50.000	OPD Provinsi	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah							Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	100%	125.000							Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	100%	36.115	12 Bulan	150.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100%	35.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100%	21.000	12 Bulan	80.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	100%	40.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	100%	16.855	12 Bulan	72.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100%	123.200	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100%	84.564	12 Bulan	250.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah							Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	100%	210.000							Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	100%	25.891	12 Bulan	220.000	OPD Provinsi	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0.00.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	8.000.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	6.000.000	12 Bulan	9.000.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
0.00.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	1.200.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	821.443	12 Bulan	1.400.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
0.00.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	12.500.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	13.404.668	12 Bulan	13.000.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah							Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	100%	910.000							Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	100%	329.013	12 Bulan	750.000	OPD Provinsi;	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
					Capaian Program			Keluaran		Hasil						Capaian Program			Keluaran		Hasil						
		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Uraian	Target		Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
			Satuan	Volume		Satuan	Volume							Satuan	Volume		Satuan	Volume									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	100%	410.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	100%	133.160	12 Bulan	500.000	OPD Provinsi; DKI JAKARTA; DEMAK; MAGELANG; KARANGANYAR; TEMANGGUNG; BREBES; SEMARANG; WONOGIRI; TEGAL; REMBANG; PEKALONGAN; BATANG; KOTA SURAKARTA; KEBUMEN; BANJARNEGARA; SUKOHARJO ; KOTA MAGELANG; WONOSOBO; KOTA PEKALONGAN; SRAGEN; JEPARA; PATI; BOYOLALI; PURBALINGGA; PURWOREJO ; KOTA SEMARANG; KOTA TEGAL; BLORA; KLATEN; KOTA	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	400.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	124.850	12 Bulan	457.000	OPD Provinsi	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100%	620.900	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100%	361.106	12 Bulan	750.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100%	550.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100%	124.666	12 Bulan	670.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah							Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	635.000							Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	127.178	12 Bulan	650.000	OPD Provinsi	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah							Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	100%	390.000							Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	100%	151.624	12 Bulan	420.000	OPD Provinsi; SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah							Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	100%	400.000							Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	100%	101.670	12 Bulan	450.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	4.476.643	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	806.932	12 Bulan	5.000.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN KEUANGAN
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100%	40.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	100%	35.000	12 Bulan	90.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	100%	40.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	100%	16.500	12 Bulan	70.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah							Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	100%	75.000							Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	100%	17.500	12 Bulan	100.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah							Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	100%	20.000							Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	100%	62.000	12 Bulan	65.000	OPD Provinsi; SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah							Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	35.000							Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	12 Bulan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100%	21.000	12 Bulan	90.000	OPD Provinsi	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100%	15.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100%	22.164	12 Bulan	30.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah							Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	100%	55.000							Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12 Bulan	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	100%	62.200	12 Bulan	60.000	OPD Provinsi	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	25.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	74.000	12 Bulan	57.245	OPD Provinsi	SUB BAGIANTATA USAHA BIRO
0.00.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	9.000.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	4.427.950	12 Bulan	10.000.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA
0.00.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	200.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	65.890	12 Bulan	200.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PROTOKOL

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0.00.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	5.500.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	2.646.270	12 Bulan	5.500.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA
0.00.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	10 Paket	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	7.000.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	17 Paket	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	3.590.428	10 Paket	8.800.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA
0.00.01.013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	5 Unit	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	3.150.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	11 Unit	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	2.923.395	5 Unit	4.500.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
0.00.01.014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	900 Set	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	800.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	50 Set	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	84.836	900 Set	800.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
0.00.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	40 Orang	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	241.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	8 Orang	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	33.972	40 Orang	286.225	OPD Provinsi	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
0.00.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	4 Laporan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	250.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	4 Laporan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	47.529	4 Laporan	250.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN LIPUTAN DAN DOKUMENTASI
0.00.01.020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	1.700.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	593.179	12 Bulan	1.700.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	RKPD MURNI TAHUN 2020											RKPD PERUBAHAN TAHUN 2020											Prakiraan Maju Tahun 2021		Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/ Unit Kerja
		Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Tahun 2020 Rp. (000)	Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah			Indikator Kinerja Tahun 2020							Pagu Indikatif Perubahan Tahun 2020 Rp. (000)				
		Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil			Uraian	Target		Capaian Program			Keluaran		Hasil						
			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Satuan	Volume	Tolok Ukur	Target Satuan	Target Volume	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
0.00.01.021	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	9.500.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	3.739.872	12 Bulan	9.500.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA
0.00.01.022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	4.500.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	100%	2.182.702	12 Bulan	5.500.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA
0.00.01.023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	12 Bulan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	530.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	76	Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	12 Bulan	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	100%	224.530	12 Bulan	629.700	OPD Provinsi	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
0.00.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85					275.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85					172.203		250.000		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
0.00.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	1 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85%	175.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	1 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85%	128.738	1 Dokumen	150.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
0.00.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85	Jumlah laporan evaluasi Setda	1 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85%	100.000	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	77	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	85	Jumlah laporan evaluasi Setda	1 Dokumen	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	85%	43.465	1 Dokumen	100.000	OPD Provinsi; KOTA SEMARANG	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
Total												###########											**82.627.387**		**171.047.805**		

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berisi penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 di tengah pandemi *Covid-19*. Renja Setda ini juga menjadi acuan pengendalian pencapaian target-target pembangunan tahun 2020 untuk menjaga efektifitas pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Proses Renja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran meliputi tahapan penyusunan, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil pelaksanaan. Pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja akan memudahkan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja dan memperbaiki kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.

Renja Perubahan Sekretraiat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dijabarkan ke dalam RKA sebagai perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan dan menjamin pencapaian target–target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar target-target pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka biro-biro lingkup Setda perlu menentukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran. Pencapaian target-target kinerja tahun 2020 diharapkan mampu menyiptakan faundasi yang kuat bagi pencapaian target kinerja tahun 2021 dan mendukung tercapainya visi dan misi Gubernur Jawa Tengah periode 2018 – 2023.